

Submission	Review Process	Revised	Accepted	Published
03-07-2020	07-07 s/d 10-08-2020	24-08-2020	27-08-2020	28-08-2020

Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization, Vol. 1 No.3, Agustus 2020 (184-198)

Published by: Politik Islam UIN Raden Fatah Palembang

Elit Lokal Berbasis Pesantren dalam Kontestasi Politik di Kecamatan Banyuasin III Studi Pada Pencalonan Buya H.M Husni Thamrin Madani Tahun 2018

Diah Lorenza

Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: diahlorenza7@gmail.com

ABSTRACT

This research is entitled "Local Elites Based on Islamic Boarding Schools in Political Contest in Banyuasin III District (Study on the Candidacy of Buya H.M Husni Thamrin Madani in 2018)". This type of research is field research with the methods of collecting interview data, observation and documentation while the data analysis techniques in this study are data reduction, data presentation and data verification. The results of this study can be concluded that Buya H.M Husni Thamrin Madani was involved in the Pilkada because the previous Regent who was caught in the act was the trigger. Buya H.M Husni Thamrin Madani is very sad to witness the fact that there is corruption in the education sector in Banyuasin. And Hati Buya, called as a parent, is also called to return to protect Banyuasin.

The defeat factor of Buya H.M Husni Thamrin Madani in the Pilkada was because the machine of the Democratic Struggle Party (PDIP) was working. Meanwhile, Buya Husni does not have a Party. Based on Buya Husni's Political Marketing Theory, it is still selling well, especially in the Pangkalan Balai area. Even though Buya Husni's Political Marketing still has many weaknesses. And the number of votes that Buya Husni received was quite good. This is a sign that Banyuasin people still have respect for a scholar.

Keywords: *elite, political contestation, marketing*

ABSTRAK

Penelitian ini dengan judul "Elit Lokal Berbasis Pesantren dalam Kontestasi Politik di Kecamatan Banyuasin III (Studi pada Pencalonan Buya H.M Husni Thamrin Madani Tahun 2018)". Jenis penelitian ini yaitu *Field research* dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data dalam penelitian

ini yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Buya H.M Husni Thamrin Madani terlibat dalam Pilkada karena Dari Bupati sebelumnya yang tertangkap tangan menjadi pemicu. Buya H.M Husni Thamrin Madani sangat sedih menyaksikan fakta bahwa ada korupsi di bidang pendidikan di Banyuasin. Dan Hati Buya terpanggil sebagai orang tua juga terpanggil untuk kembali mengayomi Banyuasin.

Faktor Kekalahan Buya H.M Husni Thamrin Madani dalam Pilkada dikarenakan Mesin dari Partai Perjuangan Demokrasi Perjuangan (PDIP) ini bekerja. Sedangkan Buya Husni tidak ada Partai. Berdasarkan dengan Teori Marketing Politik Buya Husni masih Laku terutama di daerah Pangkalan Balai. Walaupun Marketing Politik Buya Husni masih banyak kelemahannya. Dan jumlah suara yang diterima Buya Husni cukup baik. ini merupakan sebagai tanda masyarakat banyuasin masih punya rasa hormat kepada seorang ulama.

Keywords: *elit, kontestasi politik, pemasaran*

PENDAHULUAN

Penelitian ini akan Mengurai dan Menjelaskan bagaimana Keterlibatan Ulama dalam Politik Praktis di Banyuasin III. Dalam Kontestasi Politik secara Spesifik Penelitian ini akan melihat bagaimana Kekalahan Buya H.M Husni Thamrin Madani dalam Pilkada 2018 di Dapil Banyuasin III. Banyuasin III meliputi daerah Langkan. Perkembangan Islam Nusantara tidak bisa terlepas dari kedudukan dan pengaruh ulama. Dalam Islam dan masyarakat muslim manapun termasuk di Banyuasin III, ulama menempati posisi yang sangat penting dalam ajaran Islam. Kedudukan ulama ditempatkan secara historis sosiologis yang memiliki otoritas dalam bidang keagamaan. Ulama tidak hanya sekedar dihormati dan disegani, namun gagasan dan pemikiran keagamaannya dalam berbagai dimensi dipandang sebagai kebenaran, dipegang dan diikuti secara akurat dan mengikat, artinya baik secara teologis maupun secara historis-sosiologis, ulama merupakan kelompok elit keagamaan yang sangat penting. (Bayumi, 2018)

Dalam Pesantren, Ulama merupakan tokoh sentral yang mempunyai peranan sebagai decision maker (pembuat keputusan) dalam segala hal. Ulama diyakini mempunyai eksistensi karismatik yang merupakan perwujudan dari doktrin al-ulama “waratsah al-anbiya” (ulama adalah pewaris para nabi).

Rasulullah Shallahu alaihi wa sallam bersabda :

الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

“Ulama merupakan Pewaris dari Para Nabi”. H.R At-Tirmidzi dari Abu Ad Darda Ra.

Di era modern sekarang ini, bukanlah suatu perkara yang aneh jika Ulama Pesantren terjun dalam dunia politik. Karena pada dasarnya, tokoh pendiri bangsa Indonesia pun banyak bergelar ulama. Ulama yang berada dalam perpolitikan di Indonesia bukanlah yang asing lagi. Dari semenjak dahulu peran ulama dalam mendirikan

bangsa Indonesia ini memang harus kita akui. Dan tidaklah heran jika ulama terlibat dalam urusan politik. Atau bahkan ulama itu sendiri yang dengan sengaja mau terjun ke panggung politik sebagai tokoh utama dari partai politik ataupun dari independen. Sementara itu, sosok ulama adalah sosok yang sangat dikenal dengan pemandu umat islam karena kepandaiannya dalam keilmuan islam. Bukanlah hal asing lagi lagi apabila ulama pada dasarnya telah memiliki umat dan santri yang banyak. Ulama yang mampu memberikan pengaruh kepada masyarakatnya karena kharismanya yang dianggap masyarakatnya tinggi, apalagi masyarakat yang fanatic terhadap ulama tersebut. (Amin, 2009)

Pada Pemilihan Bupati Banyuasin pada Tahun 2018 seorang Buya H.M Husni mencalonkan diri sebagai Bupati Banyuasin. Namun gagalnya Buya H.M Husni Thamrin Madani dalam Pemilihan Bupati Banyuasin pada tahun 2018, merupakan kesedihan masyarakat terkhususnya pendukung Partisipan Buya. Sedangkan Buya H.M Husni Thamrin Madani merupakan Pimpinan/pendiri Pondok Pesantren Qadratullah Terbesar di Kecamatan Banyuasin III yang berdiri pada tahun 1972 yang mulai di Pimpin pada tahun 1988. Dan Buya H.M Husni Thamrin Madani juga Merupakan Tokoh Agama sekaligus Tokoh Masyarakat dan sebagai Pendiri/Pemekaran Banyuasin pada tahun 1999 ketika Banyuasin masih menjadi Musi Banyuasin waktu itu.

Menariknya Penelitian ini adalah dimana ulama yang merupakan sosok yang dikenal dengan pemandu umat islam karena Kharisma dan kepandaiannya dalam keilmuan islam. Sebagai ulama yang merupakan Pimpinan/Pendiri Pondok Pesantren Qodrattullah pada tahun 1988 hingga sekarang. Dan ulama yang memestinya memiliki umat dan santri yang banyak, mampu memberikan pengaruh kepada umat dan santrinya karrena kharismanya yang dianggap umatnya tinggi. Namun sebagai Ulama terkenal berpengaruh akan tetapi tidak mampu memenangkan Kontestasi Politik/ Pilkada di Banyuasin pada tahun 2018.

Dari serangkaian proses politik dari sejak zaman reformasi sampai pemilu 2019 kemarin pasti ada proses perubahan-perubahan pertimbangan yang mendasari sikap politik masyarakat. Perubahan pilihan inilah yang menarik untuk diteliti lebih spesifiknya mengapa setiap pemilunya pilihan masyarakat berbeda-beda dalam setiap pemilunya. Kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh manusia, menurut para psikolog sosial, dikategorikan sebagai kegiatan yang “tidak lagi dipikirkan” (Langer, Blank, dan Chanowitz, 1978 dalam Petty dan Cacioppo, 1981). Oleh karena itu, kegiatan yang merupakan rutinitas tersebut kurang bisa diprediksi dengan berdasarkan pada sikap individu terhadap kegiatan tersebut. Namun demikian, sikap merupakan salah satu prediktor tingkah laku yang baik terhadap suatu objek sikap dalam kondisi tertentu (Ajzen dan Fishbein, 1971 dalam Petty dan Cacioppo, 1981). Contohnya seperti sikap terhadap Pemilu, mengingat Pemilu merupakan suatu kegiatan yang hanya terjadi satu kali dalam kurun waktu lima tahun.

Sikap adalah sebuah pengalaman yang terkait dengan objek yang spesifik, kejadian, orang-orang atau isu, dan sangat evaluatif. Kedua peneliti tersebut juga menyebutkan bahwa terdapat dua sudut pandang yang dimiliki oleh para peneliti psikologi sosial tentang sikap yaitu:

- a. Sikap sebagai sebuah mental files yang tersimpan dalam ingatan dan dapat digunakan sewaktu-waktu.
- b. Sikap sebagai sebuah penilaian yang bersifat evaluatif berdasarkan pada informasi yang didapatkan pada situasi saat itu.

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan pada tanggal 10 November 2019, pada beberapa masyarakat yang ada di Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, dapat dikatakan mereka memiliki pilihan yang berbeda pada setiap pemilihan umum legislatif yang telah dilaksanakan, karena dalam setiap pemilunya mereka memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap calon anggota legislatif yang ada, mulai dari faktor internal seperti ideologi dan pandangan sendiri terhadap calon anggota legislatif tersebut. Sedangkan faktor eksternalnya ialah mulai dari perbedaan partai politik maupun faktor lingkungannya. Hal inilah yang membuat perlunya penelitian untuk mengetahui sikap politik masyarakat dalam setiap terjadinya proses pemilihan umum Legislatif (Pemilu).

Dari sudut pandang tersebut dapat dilihat bahwa sikap dapat terbentuk melalui pengalaman individu terhadap suatu objek sikap. Sikap, menurut Smith (1947), Memiliki tiga buah komponen yaitu afektif (affective), Kognitif (cognitive), dan konatif (central tendency). Sikap menjadi penting untuk diperhatikan lebih lanjut karena dapat mempengaruhi respon afektif, kognitif, dan konasi seseorang (Bohner & Wanke, 2002). Selain itu, masih menurut peneliti yang sama, sikap seseorang terhadap satu objek sikap dapat mempengaruhi tingkah lakunya terhadap objek sikap lainnya. Sikap yang dimiliki oleh individu dapat terbentuk dari pengalaman maupun informasi yang di dapatkan oleh individu terkait objek sikap.

Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam teori pembentukan sikap. Salah satu dari pendekatan tersebut yaitu *social judgmental-involvement approach*. Pendekatan ini memiliki asumsi dasar bahwa setiap orang melakukan pengelompokan suatu stimulus secara teratur berdasarkan sebuah dimensi psikologis (Petty & Cacioppo, 1981). Hal tersebut dapat disebut juga sebagai kategorisasi. Sikap individu terhadap suatu objek sikap dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu favorable, netral, dan unfavorable. Dalam proses kategorisasi untuk membentuk sikap, seseorang memerlukan informasi, pengalaman, dan waktu untuk belajar dan mencari informasi mengenai isu-isu yang terkait.

Seperti yang telah dilaksanakan bersama pada tanggal 17 april 2019 yang lalu merupakan pesta demokrasi lima tahunan yaitu pemilihan umum anggota legislatif. Masyarakat Muslim Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang yang masuk pada Daerah Pemilihan (Dapil II) Kota Palembang, dengan jumlah pemilih sebanyak 60.139 orang melakukan proses pemilihan di 169 Tempat Pengumutan Suara (TPS) yang tersebar di 6 Kelurahan di Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang. (Sumber yang di dapat dari websait KPU).

TINJAUAN LITERATUR

Kajian hubungan ulama dan politik sudah banyak dilakukan diantaranya yang dilakukan oleh Titis Thoriquttyas tentang “Elit Agama Islam dan Politik Preferensi Gus dan Lora dalam Kontestasi Politik” serta “Eksistensi Ulama di Panggung Politik dalam Perspektif

Santri” yang ditulis oleh Muhammad Alzibila yang mana dalam penelitian ini lebih berfokus kepada respon santri terhadap peran ulama sebagai pewaris para Nabi.

Adapun penelitian yang saya lakukan yang mana mengkaji tentang elit local pesantren dan kontestasi politik di Banyuasi memiliki perbedaan tersendiri dalam penelitian dan hasilnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang ditempuh oleh peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian atau rumusan masalah. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang didukung oleh data-data yang bersifat kualitatif dengan format deskriptif dengan tujuan untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena yang timbul di masyarakat sehingga menjadi objek penelitian berdasarkan apa yang terjadi. Metode penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang berupaya melakukan penggalan, pemahaman, dan pemaknaan terhadap apa yang terjadi pada berbagai individu atau kelompok yang berasal dari perosalan sosial atau kemanusiaan, penelitian kualitatif juga berfokus bagaimana peneliti memandang suatu fenomena.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterlibatan ulama dalam politik secara praktis dalam konteks dewasa ini menjadi kontroversi tersendiri di kalangan masyarakat dan masyarakat berharap ulama harus konsisten dengan tugas utamanya sebagai figur keagamaan yang bertugas mendakwah keagamaan dan memberikan fatwa. dan Konsentrasi ulama harus tetap berada pada wilayah keagamaan dan tidak boleh bergerak ke territorial politik apalagi politik praktis.

Sebagian masyarakat yang tidak setuju ulama terlibat dalam Politik Praktis seperti Kalangan Akademisi adalah sekedar rasa kekhawatiran terhadap multi peran yang nantinya akan dipikul oleh ulama disamping sebagai tokoh agama sekaligus sebagai politisi. Kekhawatiran tersebut seperti kurang totalitas dalam melaksanakan peran utamanya dalam bidang keagamaan seperti biasanya (pengajian dan dakwah). (Wawancara pribadi dengan H. Senen Naning)

Seorang Ulama atau orang yang bergerak dalam bidang agama ikut terlibat terhadap politik atau terjun langsung ke dunia politik itu sah-sah saja karena dalam undang-undang membuka kran bagi siapa saja yang akan berbuat untuk bangsa dan Negara terlebih dalam jabatan politik itu sah-sah saja dan merupakan hak bagi setiap warga Negara.

Sebagaimana diatur dalam Hak Turut Serta dalam Pemerintahan Pasal 43 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu:

1. Setiap warga negara berhak untuk dipilih maupun memilih dalam pemilihan umum berdasarkan dengan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.

2. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

3. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Keterlibatan ulama dalam politik secara praktis menjadi kontroversi tersendiri di kalangan masyarakat. Sebagian kelompok masyarakat berharap ulama harus konsisten dengan tugas utamanya sebagai figur keagamaan yang bertugas mendakwah keagamaan dan memberikan fatwa. Konsentrasi ulama harus tetap berada pada wilayah keagamaan dan tidak boleh bergerak ke politik apalagi politik praktis. Sebagian masyarakat juga berharap hal yang sebaliknya. Ulama harus terlibat secara intens dalam berbagai peran, termasuk bergerak aktif dalam berpolitik baik substansial maupun politik praktis, karena berpolitik merupakan hak setiap warga negara dan tidak terkecuali ulama.

Fenomena dan kenyataan nabi Muhammad Saw sebagai pemimpin politik, pendiri dan pemimpin Negara memunculkan kesadaran dan pengakuan dikalangan Muslimin, bahwa islam di samping sebagai agama. Adalah juga sebagai sistem politik. Paling tidak, dapat dikatakan bahwa islam tidak dapat dipisahkan dari politik dan politik tidak mungkin lepas dari islam. Bukankah kenyataannya, Muhammad Saw adalah seorang nabi dan rasul sekaligus negarawan. Nabi Muhammad Saw memimpin dan membangun Negara dengan berbagai kemajuan sosial politik pun telah terbukti, Sepeniggal pendirinya. (Wawancara pribadi dengan M. Hanif Munaf)

Semenjak 14 abad yang lalu Rasulullah beliau merupakan Figur 1 orang menjadi 2 figur. Dimana Rasul sebagai Pemimpin Agama dan juga sebagai Pimpin Negara. Jelas bahwa keterlibatan ulama dalam hal berpolitik itu sangat berperan penting untuk kelangsungan suatu lembaga ataupun instansi dan baik ia terjun langsung ke dunia politik ataupun ia tidak terjun langsung ke dunia politik secara langsung. Karena sebagai Ulama mereka bisa mentransferkan nilai-nilai agama dalam bentuk kekuasaan.

Dengan keterlibatan ulama yang memahami agama ketika ia terjun ke dunia politik praktis maka Bergeraknya seorang ulama tersebut tetap dalam panduan-panduan Hukum Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Dengan pemahamannya seorang ulama tentang hukum islam maka kran untuk berbuat yang tidak baik semakin sulit, karena ia paham yang tidak baik semestinya tidak untuk dilakukan. (Syam, 2015) Dan menanamkan kesadaran bahwa kepemimpinan adalah amanah yang harus dipertanggung jawabkan.

Dalam skala di Banyuasin yang mayoritas masyarakatnya islam saatnya ulama turun untuk berkecimpung dalam bidang politik yang menjadi harapan dengan turunnya ulama ke dunia politik bisa membuat masyarakat menjadi masyarakat yang islami. Menjadikan Masyarakat yang islami ialah Masyarakat yang dibangun seperti Nabi SAW dimana yang mencerminkan keutamaan yang menekankan pada nilai-nilai aspek kehidupan secara langsung terkait dengan nilai dasar tauhid dan persamaan manusia, keadilan dan demokrasi yang memberikan landasan bagi kehidupan sosial dan politik umat Islam pada umumnya. Dengan munculnya pemimpin sebagai seorang ulama yang berkecimpung dalam bidang islam maka ia sebagai pemimpin memastikan seluruh masyarakatnya berada dalam bingkai islami.

Sebelum buya mau dicalonkan ada beberapa Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Akademisi, Tokoh Professional berkumpul sepakat bahwa 2016 Pasca Bupati Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK maka 2018 sepakat para Tokoh-tokoh mengusung bahwa Putra Banyuasin harus jadi Bupati dan Wakil Bupati. Karena setelah Pemekaran dari Musi Banyuasin pada 2002 sampai 2018 masa periodenya dipimpin oleh orang yang bukan asli Banyuasin pada saat Banyuasin dimekarkan yang seharusnya untuk Pemberdayaan Masyarakat Banyuasin seharusnya Banyuasin dipimpin oleh Putra Asli Banyuasin.

Maka, pada April 2012 muncul nama Buya didaulat oleh beberapa Tokoh untuk bersedia dicalonkan sebagai Calon Bupati periode 2018-2023. Turunnya Buya ke Politik bukan keinginan pribadi tetapi dicalonkan oleh beberapa Tokoh. Buya juga melangkah ke dunia politik berpikir terlebih dahulu selama 2 bulan dan ketika April 2017 Buya didaulat, bulan Juni Buya menjawab kalau itu keinginan para Tokoh Buya bersedia tetapi dengan beberapa catatan diantaranya:

1. Buya tidak ingin maju sebagai calon bupati melalui jalur partai tetapi melalui jalur independen.
2. Proses yang melalui jalur independen melalui ktp apabila disahkan oleh KPU sebagai calon bupati maka tidak ada mahar-mahar, uang yang diberikan kepada calon pemilih baik dari buya maupun masyarakat yang mau membantu.
3. Andaikan Allah takdirkan 'Iya' maka yang menjadi Bupati bukan Buya yang terpilih tetapi seluruh masyarakat Banyuasin yang mendukung terpilih buya itulah Bupati Banyuasin

Itulah beberapa catatan Buya mau dicalonkan sebagai Bupati Banyuasin. akhirnya diterima beberapa Tokoh maka pencalonannya melalui jalur independen dengan mengumpulkan ktp pada saat itu terkumpul 125000 ktp namun berdasarkan dari KPU minimal mengumpulkan 63000 ktp ternyata Buya dapat mengumpulkan 125000 KTP pada saat itu hingga pada akhirnya Buya bersedia menjadi Calon Bupati Banyuasin. Jadi keinginan buya turun ke dunia politik bukan bujuk-bujuk langsung ingin menjadi sebagai Calon Bupati namun dicalon oleh beberapa Tokoh. Keinginan Buya ke politik praktis yaitu karena Bupati sebelumnya tertangkap KPK artinya ada pendekatan-pendekatan agama yang harus kita depankan ketika memimpin sebuah lembaga dalam hal ini memimpin Kabupaten.

Jika kita memahami syariat bahwa sogok-menyogok pemberian seperti itu sudah jelas diharamkan dan namun tidak diatur oleh Undang-Undang dan inilah yang membuka kran terjadinya korupsi. maka mengapa Buya turun ke Dunia Politik padahal sudah mendirikan Pesantren, jika Pesantren mencakup satu desa dan satu kecamatan tapi ketika menjadi Bupati maka untuk Mengatur, Mengelola, Memenejemeni seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuasin.

Langkah pertama Buya mau turun ke Dunia Politik ingin mengantisipasi bahwa korupsi itu salah. Jadi dengan pendekatan agama Buya yang sebagai ulama maka dengan keulamaannya yang dimiliki bisa menjadi rem dan rambu-rambu jika terpilih untuk

menjalankan kebijakan sebagai seorang Bupati. Sejak Pemilihan bupati 2018 berawal dari bermusyawarahnya dari beberapa Tokoh pada saat November 2016 maka pada saat itulah Buya terjun ke dunia politik praktis. yang sebelumnya pada saat Pemekaran Kabupaten Banyuasin pada 2002 Pemilu 2004 buya sudah ditawarkan sebagai anggota DPR namun Buya tidak mau, Buya ditawarkan Kepengurus Partai Politik Buya juga tidak mau, namun Buya tetap di Pondok Pesantren. Jadi 2016 itulah Buya mau turun ke dunia Politik Praktis.

Selaku masyarakat mendukung terhadap ulama yang ikut atau berkecimbung langsung ke dunia politik praktis, karena jika ulama berperan secara langsung dia paham agama, dia tahu ilmu halal dan haram, dan kecil kemungkinan apabila beliau sebagai ulama memimpin akan melenceng dari pemahamannya mengenai agama yang selama ini. Ya sebagai masyarakat berharap jika seorang ulama memimpin maka mampu memberikan Kesejahteraan untuk masyarakatnya dan menciptakan Banyuasin yang Bersih tanpa Korupsi pada saat itu, namun ya kembali lagi ke pada masyarakat yang tidak memberikan pilihan ke pada Buya untuk menjadi Bupati Banyuasin karena masyarakat masih silau dengan uang, lebih memilih uang yang tidak seberapa dibandingkan pemimpin yang Amanah untuk kelangsungan Banyuasin 5 tahun yang akan datang.

Pencalonan Buya menjadi calon Bupati Banyuasin masyarakat mendukung, karena baru pertama kali ada ulama mau mencalonkan diri sebagai Bupati Banyuasin. Jika seorang ulama menjadi pemimpin ia yang paham agama maka lebih tahu mengenai halal dan haram. Mudah-mudahan harapan kita sebagai masyarakat apabila seorang ulama memimpin setidaknya KKN tidak akan ada lagi di Banyuasin. Itulah sebagai masyarakat mendukung Buya mencalonkan diri sebagai Bupati Banyuasin. Mendukung seorang ulama mencalonkan diri sebagai Bupati Banyuasin bisa mberikan Perubahan untuk Banyuasin, karena Banyuasin sendiri belum merasakan Perubahan yang sinigfikan selama ini. Harapan sebagai masyarakat siapa tahu dengan perannya ulama yang menduduki posisi sebagai pemimpin di Banyuasin ini, mampu menerapkan Banyuasin yang aman, damai, sejahtera, masyarakat yang islami

Latar Belakang Buya H.M Husni Terlibat dalam Pilkada 2018

Setelah Bupati yang tertangkap tangan sebelumnya menjadi Pemicu. Buya Husni yang merupakan tokoh agama sangatlah sedih menyaksikan fakta bahwa ada korupsi di bidang pendidikan di Banyuasin pada 2016. Buya sebagai orang tua hatinya terpenggil untuk mengayomi Banyuasin kembali. Banyuasin yang dicita-citakan setelah pendirian belum tercapai hingga kini. Seperti sebuah kutipan, “Kezhaliman akan terus ada, bukan karena banyaknya orang-orang jahat. Tapi karena diamnya orang baik”.

Jadi setelah OTT di Banyuasin, Buya sebagai Ulama dan Putra Banyuasin sudah semestinya ikut bekecimpung di dunia Politik agar Banyuasin Bersih tanpa Korupsi. Selain itu Buya sebagai Ulama yang mau turun ke Dunia Politik bisa mengantisipasi bahwa korupsi itu salah. Jadi dengan pendekatan agama sebagai ulama maka dengan keulamaannya yang dimiliki bisa menjadi keutamaannya untuk menciptakan Banyuasin yang Berisih tanpa korupsi dan menjadikan masyarakat yang semakin islami, jika terpilih untuk menjalankan kebijakan sebagai seorang Bupati.

Sehingga muncul ide kalau begitu harus dibangun oleh Putra Banyuasin yang harus bisa membangun karena sebagai Putra Banyuasin tahu kondisi wilayah, karakter masyarakat dan lebih mudah untuk memberikan pembangunan terhadap masyarakat apabila dijalankan oleh Putra Banyuasin itu sendiri, maka Buya menerima pinangan untuk menjadi Calon Bupati.

Buya Husni juga merasa terpanggil sebagai orangtua untuk memperbaiki kehidupan masyarakat Banyuasin dalam segala bidang. Dan memperbaiki kehidupan masyarakat Banyuasin, yang selama ini tertinggal dalam segala bidang baik infrastruktur, tingkat pengangguran, kesejahteraan sosial dan keagamaan dikarenakan ulah para pemeritahan yang koruptor di Banyuasin.

Ada beberapa Faktor yang mempengaruhi Kekalahan Buya H.M. Husni Thamrin Madani dalam pilkada 2018. Sebagian Masyarakat sendiri memandang Buya ini sebagai ulama sebaik cukup mengurus Pondok Pesantren saja, dan tidak perlu terjun ke dunia politik dan itu dampak dari pikiran yang membatasi ritual dan kewajiban kegamaaan. Yang seharusnya pikiran yang memisahkan antara urusan agama dan dunia. Padahal kita sudah mendapatkan contoh nabi kita beliau sebagai nabi dan pemimpin Negara juga. Bukan berarti sebagai ulama tidak punya kharisma untuk dipilih, namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi kekalahan Buya Husni dalam Pilkada 2018 berdasarkan dari Tim Suksesnya Buya Husni diantaranya:

1. Dari Akar Rumput atau Kader yang kurang maksimal Dimana dari waktu yang saat terbatas dari Buya “Mengiyakan” didaulat dari 2017 sementara pelaksanaan Juni 2018. Artinya kurang lebih 1 tahun kemarin kita memiliki 19 kecamatan 305 desa dan kelurahan. selama satu tahun tidak bisa menemui masyarakat yang ada diseluruh Desa yang ada di Kabupaten Banyuasin.
2. Daerah yang dominasi dengan Perairan maka yang jarak antara Desa ke Desa sehingga aksesnya sulit untuk ditempuh oleh kendaraan darat. Jadi membutuhkan kendaraan seperti Motor Ketek, Spit dll. Dan itu sangat terbatas waktunya. Itu artinya Buya Husni terkendala dengan kekurangan modal. Dimana dalam Dunia politik untuk mencapai kemenangan harus mempunyai modal yang besar karena itu sudah menjadi resiko ketika seseorang turun ke ranah politik tidak terlepas dari modal yang besar untuk menang dalam pemilihan.
3. Menurut timses nya Buya Husni Faktor dari banyaknya calon sampai lima calon dimana jumlah yang cukup banyak sehingga diatur oleh kpu tidak boleh memasuki masing-masing wilayah saat kampanye. Artinya tidak boleh saling ambil wilayah disitu yang membuat terbatas dalam pergerakan-pergerakan untuk kampanye sehingga sulit untuk memperoleh suara dari para calon pemilih.
4. Tingkat kordinasi yang sulit Dimana banyak diantara desa-desa yang masih dalam “isolir” artinya jarak tempuh yang cukup jauh media komunikasi yang terbatas itu yang tidak memungkinkan berbeda dengan tim-tim yang dikota memang lebih mudah untuk bergerak. Itu artinya selain dari tingkat kordinasi yang sulit terlihat juga Bahwa Buya tidak mempunyai Relawan yang cukup besar untuk mendapatkan perolehan suara. Berbeda dengan Askolani yang Mempunyai banyak Relawan bahkan sampai ke desa-desa disetap daerah.
5. Dimana yang sangat menentukan buya tidak memberikan janji-janji yang terkait dengan uang karena pilkada bukan rahasia umum. karena politik uang sangat

mendominasi dan itu sudah menjadi syarat yang tidak rahasia untuk memenangkan Pilkada namun pasangan dari buya tidak menggunakan politik uang saat pilkada 2018. Karena politik uang sangat mendominasi sehingga masyarakat silau dengan melihat uang

Seorang ulama yang seharusnya ia berada di ranah agama di Madrasah, di Pengajian, di Pesantren, di Masjid, di lembaga-lembaga Majelis Ta'lim. Dimana para ulama mengajarkan nilai-nilai kebenaran yang sesuai norma agama. Di dalam ranah politik ketika ia ingin mencapai kekuasaan lazimnya menggunakan berbagai cara, Dari soal kebohongan itu sarapan, soal ketidakjujuran itu hobi pada umumnya.

Jarang kita melihat bahwa persoalan tentang politik itu tidak dimanipulasi. Sehingga dunia politik ini semestinya tidak baik untuk seorang ulama, namun faktanya jika seorang ulama ingin terjun ke dunia politik bukan suatu larangan itu merupakan hak asasi setiap manusia, dan didalam agama juga harus ada pemimpin. Sementara yang dibutuhkan masyarakat sebagai seorang pemimpin itu adalah bagaimana pemimpin membawahi masyarakatnya menjadi lebih baik.

Kita melihat bahwa saat Pemilihan Bupati Banyuasin dan yang ikut dalam Pilkada ini merupakan Tokoh Politik dan Tokoh Agama. Jelas kita tahu bahwa orang yang mengerti tentang politik juga harus memahami agama. Namun bagaimana cara seorang tokoh politik dan tokoh agama merebut kekuasaan dalam Pilkada. Dari Tokoh Agama yang masih diminati oleh masyarakat, namun Tokoh agama dikalahkan oleh Tokoh Partai. Dari Buya Husni yang ikut Pilkada dari jalur Independen, dan Askolani melalui Partai Politik, Dimana sudah dua kali mencalonkan diri dalam Pilkada.

Kekalahan Buya Husni dalam Pilkada karena Mesin dari Partai Perjuangan Demokrasi Perjuangan (PDIP) ini bekerja. Sedangkan Buya Husni tidak ada Partai. Namun Buya Husni sebagai Tokoh Agama masih mendapatkan tempat dihati masyarakat, terbukti Buya mendapatkan suara sampai 20%. Buya Husni kalah karena Askolani mempunyai mesin partai yang bekerja dengan solid, dari banyak relawannya, tim suksesnya bahkan sampai ke desa-desa dan Rt diberbagai daerah. Sedangkan Buya Husni tidak mempunyai mesin partai untuk bekerja saat Pilkada.

Dan kita lihat juga dari Kurangnya Kreativitas dari tim sukses Buya Husni dalam pemilihan bupati merupakan faktor yang sangat penting untuk mencapai kemenangan. Kreativitas dari tim sukses juga menentukan menang dan kalahnya Buya Husni yang maju dalam pemilihan bupati apalagi melalui jalur independen. Buya Husni sebagai Ulama hebat dengan tim sukses yang lemah, kegagalan yang didapat. Buya Husni yang lemah dengan tim sukses kuat, keberhasilan diraih. Dalam setiap tindakan untuk merealisasikan rencana menjadi hasil yang diharapkan, pemimpin harus fokus untuk mempekerjakan orang-orang yang kreatif, proaktif, strategis, disiplin dan optimis di dalam sebuah tim sukses. Tim sukses yang seharusnya menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, terdefinisi dan konsisten dan setiap anggota tim sukses harus berkomitmen untuk menunaikan tanggung jawab mereka secara total.

Ketika keberadaan tim sukses disamping para kandidat yang maju dalam pemilihan bupati, membuat kegiatan kampanye lebih teratur, lebih tertib, terencana dan efektif. Dan dapat kita ketahui bahwa pada masa kampanye keberadaan tim sukses saja tidaklah cukup, tetapi juga harus beriringan dengan tujuan yang terukur. Memang Buya Husni dan kandidat yang dari partai politik usungan memang harus cerdas dalam memilih karakter dari pribadi-pribadi yang akan bergabung dalam tim sukses. Tim sukses yang seharusnya ditempatkan berdasarkan bakat dan kemampuannya, dimana tim sukses harus dapat mengatur dan menyusun strategi pemenangan dan pemantauan sekaligus memastikan bahwa strategi tersebut sudah berjalan sesuai harapan. karena aturan dan kebijakan harus ditetapkan sebagai fondasi yang sangat mendasar untuk membangun etos kerja tim sukses yang efektif.

Dan memang Sumber daya keuangan memainkan peran yang sangat penting untuk menggerakkan aktivitas politik yang berkelanjutan. Sumber daya ekonomi merupakan hal esensial yang dapat melancarkan seluruh aktifitas politik baik itu untuk administrasi, peralatan kampanye, dan kegiatan pendukung pencalonan yang lain. Hal ini melihat Buya Husni sebagai calon bupati dari jalur independen tidak mempunyai kendaran politik yaitu partai politik sehingga secara otomatis tidak mempunyai basis massa yang kuat. Untuk itu faktor keuangan memang menjadi salah satu sumber daya yang sangat penting untuk mendukung ataupun memberikan kemenangan calon independen dalam Pilkada.

Tabel 4 Pasangan lawan Buya H.M Husni Thamrin Madani dalam Pencalonan Bupati Banyuasin diantaranya:

Kandidat	Partai	Jumlah	Peresentase
1. Agus Yudiantor dan Hazuar Bidui	PKS/PAN	34.787	9,01%
2. Arkoni dan Azwar Hamid	HANURA/PKB	99.481	25,78%
3. Buya H.M Husni dan Supartijo	INDEPENDEN	80.321	20,81%
4. Syaiful Bakhri dan Agus Salam	GOLKAR/PKPI	39.749	10,30%
5. Askolani Jasi dan Slamet	PDIP	131.593	34,10%

Sumber: KPU BANYUASIN

Pasangan Askolani dan Slamet, unggul di 12 Kecamatan yaitu Talang Kelapa 22.596 suara, Banyuasin II 5.244 suara, Sumber Marga Telang 2.944 suara, Makartijaya 5.203 suara, Muara Padang 5.723 suara, Muara Sugihan 10.044 suara, Air Saleh 8.058 suara, Suak Tapeh 2.865 suara, Rambutan 8.200 suara, Air Kumbang 5.699 suara, Pulau Rimau 7.479 suara dan Tungkal Ilir 5.433 suara. Sedangkan Arkoni-Hazwar Hamid unggul di empat Kecamatan yakni Tanjung Lago 6.208 suara, Muara Telang 5.544 suara, Rantau Bayur 9.173 suara dan Betung 9.320 suara. Pasangan Buya Husni dan Supartijo unggul di dua Kecamatan yakni Banyuasin III 10.145 suara dan Sembawa 5.174 suara.

Jadi setelah kita lihat dalam pilkada pada tahun 2018 Buya Husni sebagai seorang Ulama dikalahkan oleh Tokoh Politik. Dari kekuatan seorang tokoh politik yang mempunyai mesin partai yang bekerja dengan solid dan lebih mudah untuk memperoleh massa yang kuat untuk menang, sedangkan Buya Husni sendiri terhambat dalam

pergerakan karena tidak ada mesin partai yang bisa membantu bekerja untuk memperoleh massa yang kuat untuk mencapai kemenangan.

Namun berdasarkan dengan Teori Marketing Politik Buya Husni masih Laku terutama di daerah Pangkalan Balai. Walaupun Marketing Politik Buya Husni masih banyak kelemahannya. Dan secara umum jumlah suara yang diterima Buya Husni cukup baik. ini merupakan sebagai tanda masyarakat banyuasin masih punya rasa hormat kepada seorang ulama.

KESIMPULAN

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan ada beberapa temuan sebagai berikut:

Buya H.M Husni Thamrin Madani lahir di Desa Langkan Kecamatan Baanyuasin III Kabupaten Banyuasin pada tanggal 15 Mei 1953. Beliau adalah anak keenam dari sembilan bersaudara. Dari pernikahannya dengan Hj. Mas Seni istri yang pertama mempunyai lima orang anak dan pernikahannya dengan Hj. Herawati istrinya yang kedua mempunyai empat orang anak. Buya H.M Husni Thamrin Madani mengawali pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Reban Gajah Kecamatan Banyuasin III (tahun 1959-1965) , PGA selama 6 tahun pada (tahun 1965-1972) yang sekarang sudah menjadi Madrasah Aliyah Negeri 3 Palembang. Disamping menempuh pendidikan formal, Buya H.M Husni Thamrin Madani pernah menempuh pendidikan non-formal, yaitu memperdalam ilmu agama di Semarang, Demak, Cibono JawaTimur. Buya H.M Husni Thamrin Madani merupakan Pendiri Pondok Pesantren Qodratullah Langkan di Kecamatan Banyuasin III.

Buya H.M Husni Thamrin Madani terlibat dalam Pilkada karena Dari Bupati sebelumnya yang tertangkap tangan menjadi pemicu. Buya H.M Husni Thamrin Madani yang merupakan tokoh agama sangat sedih menyaksikan fakta bahwa ada korupsi di bidang pendidikan di Banyuasin. Dan Hati Buya terpanggil sebagai orang tua juga terpanggil untuk kembali mengayomi Banyuasin. Banyuasin yang dicita-citakan saat pendirian belum tercapai hingga kini.

Faktor Kekalahan Buya H.M Husni Thamrin Madani dalam Pilkada dikarenakan Mesin dari Partai Perjuangan Demokrasi Perjuangan (PDIP) ini bekerja. Sedangkan Buya Husni tidak ada Partai. Namun Buya Husni sebagai Tokoh Agama masih mendapatkan tempat dihati masyarakat, terbukti Buya mendapatkan suara sampai 20%. Buya Husni kalah karena Askolani mempunyai mesin partai yang bekerja dengan solid. Sedangkan Buya Husni tidak mempunyai mesin partai untuk bekerja pada saat Pilkada.

Dan Kreativitas dari tim sukses sangat menentukan menang dan kalahnya Buya Husni yang maju dalam Pilkada apalagi melalui jalur independen. Buya Husni sebagai Ulama hebat dengan tim sukses yang lemah, maka kegagalan yang didapat. Buya Husni yang lemah dengan tim sukses kuat, maka keberhasilan diraih. Dan dapat kita tahu bahwa pada saat masa kampanye keberadaan tim sukses saja tidaklah cukup, tetapi perlu juga beriringan dengan tujuan yang terukur.

Dan memang Sumber daya keuangan memang memainkan peran yang sangat penting untuk menggerakkan aktivitas politik yang berkelanjutan. Sumber daya ekonomi merupakan hal esensial yang dapat melancarkan seluruh aktifitas politik baik itu untuk

administrasi, peralatan kampanye, dan kegiatan pendukung pencalonan yang lain. Hal ini melihat Buya Husni sebagai calon bupati dari jalur independen tidak mempunyai kendaraan politik yaitu partai politik sehingga secara otomatis tidak mempunyai basis massa yang kuat. Untuk itu faktor keuangan menjadi salah satu sumber daya yang sangat penting untuk mendukung ataupun memberikan kemenangan calon independen dalam Pilkada.

Berdasarkan dengan Teori Marketing Politik Buya Husni masih Laku terutama di daerah Pangkalan Balai. Walaupun Marketing Politik Buya Husni masih banyak kelemahannya. Dan secara umum jumlah suara yang diterima Buya Husni cukup baik. ini merupakan sebagai tanda masyarakat banyuasin masih punya rasa hormat kepada seorang ulama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Chalik, *Elit Lokal Berbasis Pesantren dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Timur*, Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 23 No. 2, Desember 2015.
- Abdul Halim, *Politik Lokal: Pola, Aktor dan Alur dan Dramatikalnya: Perspektif Teori Powercube, Modal dan Panggung*, Yogyakarta: LP2B, 2014.
- Amin Muhammad, *Mengislamkan Kursi dan Meja: Dialektika Ulama dan Kekuasaan* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Fathurrijal, *Political Marketing Elit Lokal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Nusa Tenggara Barat*. Al-I‘lam; Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam p-ISSN 2598-8883 | Vol. 2, No 1, September 2018.
- Firmanzah, *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Hasbi Aswar, *Pengaruh Ulama Dalam Politik di Negara Muslim: Studi Kasus Arab Saudi*, Jurnal Ilmu Sosial Indonesia, Vol.2, No.1, Maret 2015.
- Henny Yusalia, *Ulama dan Politik Tinjauan Peran Abdurrahman Wahid Dalam Perpolitikan Indonesia*. Wardah: No. 22/ Th. XXII/Juni 2011.
- Ibnu Burdah, *Islam Kontemporer, Revolusi dan Demokrasi*, Malang: Intrans Publishing, 2014.
- M. Basir Syam, *Kebijakan dan Prinsip Kenegaraan Nabi Muhammad Saw di Madinah (622-632) (Tinjauan Perspektif Pemikiran Politik Islam)*. Jurnal Sosial Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Vol. 1, No. 1, Juli 2015.
- Maksudi Irawan Beddy, *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoretik dan Empirik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Mikail, Kiki. “PEMILU DAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA: Menanti Kebangkitan Partai Politik Islam Di Tahun 2019”. *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam* 15, no. 1 (April 7, 2016): 107-148. Accessed January 2, 2021. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tamaddun/article/view/444>.
- Muhammad Alzibilla, “Eksistensi Ulama Di Panggung Politik Dalam Perspektif Santri”, terarsip di <http://alzibillacenter.blogspot.com/2011/02/eksistensi-ulama-di-panggungpolitik.html> di akses 18-09-2013.
- Muhammad Fadli, Muh. Kausar Bailusy, Jayadi Nas, dan Achmad Zulfikar, Keterlibatan Elit Lokal dalam Peningkatan Partisipasi Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 /06/ Vol. 6. No.2. Tahun 2018.
- Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Nyoman Kutha Ratna. *Metode Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*.
- P. Joko Subagyo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Pati Yunus, *Pedoman Dan Penyusunan Pendayagunaan Data Profil Desa Langkan Dan Kelurahan*, 2016.
- Ridwan Hasan, *Peranan dan Sikap Transformasi Politik Ulama dalam Menghadapi Pemilu 2014 di Aceh*. 514 Millab Vol XII, No. 2, Februari 2013.

- Semi Atar. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Septiyanti, A. (2020). Political Marketing dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 (Studi Kasus Tim Pemenangan Herman Deru-Mawardi Yahya di Kota Palembang). *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization*, 1(1), 14-23. Retrieved from <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Ampera/article/view/5184>
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.